

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016. Sejarah *Tax Amnesty* di Indonesia dimulai pada tahun 1964. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Namun, Sejarah *Tax Amnesty* Tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI. Di Indonesia *Tax Amnesty* Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* kedua. Sama halnya dengan tahun 1964, pada tahun 1984 Indonesia mencatat Sejarah *Tax Amnesty*. Tetapi, bukan untuk mengembalikan dana Revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official-assesment* (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke *self-assesment* (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Sejarah *Tax Amnesty* di Indonesia tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena memang sistem pajak belum terpenuhi

(<http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di->

<indonesia.html>). Pada tahun 2016 pemerintah Indonesia kembali mengadakan program *Tax Amnesty* yang ketiga kalinya, dan hasilnya tergolong berhasil, karena Indonesia memecahkan rekor sebagai penerima uang tebusan amnesty pajak tertinggi di dunia (<https://bisnis.tempo.co/read/808419/indonesia-pecahkan-rekor-uang-tebusan-tax-amnesty-tertinggi>).

Subjek *Tax Amnesty* adalah warga negara Indonesia baik yang ber NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata). Setelah subjek *Tax Amnesty* mengikuti *Tax Amnesty*, maka bukan berarti kewajiban perpajakannya selesai. Melainkan harus melaporkan laporan penempatan harta tambahan selama tiga tahun berturut-turut, laporan pertama dilakukan paling lambat pada akhir maret 2017, laporan kedua dilakukan pada akhir maret 2018, dan laporan ketiga pada akhir maret 2019. Setelah itu kewajiban *Tax Amnesty* barulah selesai.

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, terutama wajib pajak yang belum seluruhnya melaporkan hartanya dalam SPT tahun 2015 seperti yang dilakukan oleh Bapak Putu Arya. Terkait kasus *Tax Amnesty* Bapak Putu Arya belum melaporkan hartanya dalam SPT 2015 berupa mobil seharga Rp 200.000.000 dan rumah senilai Rp 350.000.000, sehingga Bapak Putu Arya memanfaatkan program *Tax Amnesty* untuk melaporkan hartanya tersebut. Serta kewajiban yang harus

dilakukan oleh Bapak Putu Arya setelah melaporkan *Tax Amnesty*nya. Bapak Putu Arya merupakan wajib pajak orang yang memiliki usaha dagang *accecoris* mobil yang omsetnya satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000, sehingga kewajiban perpajakannya menggunakan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yaitu dengan menyeter PPh final sebesar 1% dari omset setiap bulan. Karena wajib pajak UMKM Bapak Putu Arya dikenakan tarif *Tax Amnesty* sebesar 0,5% dan meminta bantuan dalam melaporkan laporan *Tax Amnesty*nya tersebut kepada Kantor Konsultan Pajak Adyanto serta dalam melaporkan laporan penempatan harta tambahan juga meminta bantuan KKP Adyanto untuk mengurusnya sampai kewajiban *Tax Amnesty*nya selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam laporan praktik kerja lapangan yang berjudul “Pelaporan dan Pasca *Tax Amnesty* Wajib Pajak Orang Pribadi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apa kewajiban perpajakan Bapak Putu Arya selama ini ?
2. Bagaimana pelaporan *Tax amnesty* Bapak Putu Arya ?
3. Apa yang harus dilakukan Bapak Putu Arya setelah mengikuti *Tax Amnesty*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dari laporan PKL ini adalah :

1. Menjelaskan kewajiban perpajakan Bapak Putu Arya selama ini.
2. Mengetahui bagaimana pelaporan *Tax Amnesty* Bapak Putu Arya.
3. Mengetahui apa yang harus dilakukan Bapak Putu Arya setelah mengikuti *Tax Amnesty*.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak diantaranya yaitu :

1. Bagi penulis
Bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan pengaplikasian ilmu yang telah didapat selama kuliah dan magang khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Bagi pembaca
Bermanfaat bagi pembaca sebagai saran informasi untuk menambah pengetahuan khususnya dalam bidang penghitungan dan pelaporan *Tax Amnesty* dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi wajib pajak
Bermanfaat bagi wajib pajak untuk memberikan informasi mengenai tata cara pelaporan serta penghitungan *Tax Amnesty*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan ilustrasi tentang pembahasan yang lebih jelas dalam laporan praktik kerja lapangan. Laporan ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penulisan, Manfaat Penulisan, serta Sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori membahas mengenai seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga teori-teori tersebut akan digunakan sebagai landasan dalam pembahasan masalah yang akan diteliti.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran umum kantor konsultan pajak Adyanto consultant management dan metode penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penulisan.